

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KELURAHAN PANGONGANGAN TAHUN 2022**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	<b>Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlaranglainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 Huruf H dan J ;</li> <li>b. UU no 43 Tahun 009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf H</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	<b>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan :</b> <b>a.Dokumen Keuangan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya</li> <li>- Surat pencairan anggaran</li> </ul> <b>b.Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</b> <b>c. Memorandum/surat – suratpenting yang perlu dirahasiakan</b> <b>d.Disposisi surat pimpinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP,pasal 17;</li> <li>- UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat ( 1 ) dan( 2 )</li> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I.</li> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku</li> <li>- Selama masih berlangsung penyelenggara an ya</li> <li>- Selama status perlindungan masih berlaku</li> <li>- Sampai dengan proses penyelesaian konflik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Mengganggu kepentingan perlindungan hak</li> <li>- Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi</li> <li>- Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunankebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan data lengkap yang dilindungi proses penegakan hukum</li> <li>- Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi</li> <li>- Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Mengamankan proses penyusunankebijakan</li> </ul>

3.	<b>Data Pribadi Penduduk KK dan NIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I.</li> <li>- UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2, Pasal 85 Ayat 1, 2 dan 3 .</li> <li>- UU no 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat 1, Pasal 79 Ayat 1</li> </ul>	Permanen / atas ijin yang bersangkutan / kepentingan publik yang berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Berpotensi disalah gunakan</li> </ul>	Melindungi data pribadi
4	<b>Penilaian Kinerja / Prestasi Kerja Pegawai</b>	PP nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS	- Selama masih berlaku	Dapat disalah gunakan	Bisa menjaga keakuratan dan obyektifitas PNS
5	<b>Keputusan ijin/ keterangan tentang perceraian PNS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I.</li> <li>- UU no 8 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</li> <li>- PP Tahun 83 Jo, PP 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS</li> </ul>	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melindungi rahasi pribadi PNS</li> <li>-Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
	<b>Data pribadi Penduduk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP , pasal 17 huruf H</li> <li>- UU no 23 Tahun 2006</li> </ul>		Data Pribadi bisa di salah gunakan	Melindungi data pribadi

7	<b>Data Objek Pajak dan Retribusi</b>	-UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40; -UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17huruf j.	Samapi ada perintah penegak hukum yang berwenang	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi dan mengamankan database obyek pajak
8	<b>Laporan Pajak Pribadi ( LP2P )</b>	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan	- Mengungkap rahasia kekayaan pribadi	- Melindungi rahasia kekayaan pribadi
9	<b>Kode / Akses Password Aplikasi Elektronik</b>	- UU no 11 ITE Pasal 30 ayat 1, 2,3	Permanen	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi dan mengamankan data

**LURAH PANGONGANGAN**

**EVA ANJARIKA RAHMAWATI, S.STP**

**Penata**

**NIP. 19910623 201206 2 003**